

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tahapan-Tahapan Yang Dilakukan Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Nagari Gunung Bungbuk Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

1. Gambaran Umum Tentang Nagari Gunung Bungbuk Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

Nagari Gunung Bungbuk Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, yang memiliki luas wilayah sebesar 21.41 kilometer persegi, merupakan bagian dari Kecamatan IV Jurai di Kabupaten Pesisir Selatan. Penduduk nagari ini berjumlah 988 jiwa, terdiri dari 515 laki-laki dan 473 perempuan. Secara keseluruhan, Kecamatan IV Jurai memiliki populasi sebanyak 51.746 jiwa, yang terbagi menjadi 26.006 laki-laki dan 25.740 perempuan.²⁸

Dalam bidang pendidikan, Nagari Gunung Bungbuk Lumpo berperan penting dengan memiliki 18 Sekolah Dasar (SD) Negeri yang tersebar di nagari tersebut. Selain itu, terdapat empat SD Swasta yang juga menyediakan layanan pendidikan. Nagari ini juga memiliki satu Madrasah Ibtidaiyah negeri, memberikan alternatif pendidikan selain sekolah dasar.

Fasilitas kesehatan di Nagari Gunung Bungbuk Lumpo mencakup berbagai pilihan, seperti rumah sakit, rumah sakit bersalin, poliklinik,

²⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmadi, selaku Kasubag Perencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jumat 22 Desember 2023, Pukul 10.00 WIB.

puskesmas, dan apotek. Keberadaan fasilitas ini memberikan pelayanan kesehatan yang penting bagi penduduk nagari tersebut.

Dalam aspek keagamaan, Kecamatan IV Jurai menunjukkan keberagaman dengan adanya 46 masjid dan 63 musala. Hal ini mencerminkan keragaman budaya dan agama di wilayah tersebut, memberikan tempat ibadah bagi masyarakat untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan dan kepercayaan mereka.²⁹

Secara keseluruhan, kondisi Nagari Gunung Bungbuk Lumpo dan Kecamatan IV Jurai mencerminkan upaya dalam menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan tempat ibadah yang kurang mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Informasi ini memberikan gambaran lebih rinci tentang struktur demografi, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan di wilayah tersebut.

Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan memiliki peran strategis dalam membantu masyarakat melalui pelaksanaan tugas dan kewenangannya yang berfokus pada program-program kesejahteraan masyarakat, dinas ini menjadi garda terdepan dalam menjalankan berbagai kebijakan pemerintah yang bertujuan mengatasi tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh keluarga-keluarga miskin di Kabupaten Pesisir Selatan. Dinas Sosial berupaya menciptakan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan. Melalui kerja keras dan komitmen dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, diharapkan dinas ini dapat menjadi pilar utama dalam

²⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmadi, selaku Kasubag Perencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jumat 22 Desember 2023, Pukul 10.00 WIB.

mengubah realitas kemiskinan menjadi kesejahteraan di Kabupaten Pesisir Selatan. Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan juga memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

VISI

“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat, Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional”

MISI

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan.
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat.
3. Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah.
4. Meujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan.
5. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing.
6. Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tentram dan Dinamis.

Data Demografi Pekerjaan Penduduk Di Nagari Gunung Bungkok Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan yang didapatkan penulis dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

TABEL 3.1
Data Pekerjaan Penduduk Nagari Gunung Bungbuk Lumpo Kecamatan IV Jurai

No.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Belum/Tidak Bekerja	166	18,76%
2	Mengurus Rumah Tangga	208	23,50%
3	Pelajar/Mahasiswa	264	29,83%
4	Pegawai Negeri Sipil	8	0,90%
5	Petani/Pekebun	133	15,03%

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas yang diperoleh penulis dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dengan mewawancarai Bapak Rahmadi selaku Kasubag Perencana,³⁰ dapat dikatakan bahwa sebanyak 166 warga atau 18,76% dari responden belum atau tidak bekerja, sebagian masyarakat yang belum terlibat dalam kegiatan ekonomi. Di sisi lain, 208 warga atau 23,50% dari responden menghabiskan waktu mereka dengan mengurus rumah tangga.

Selanjutnya, 264 warga atau 29,83% adalah pelajar atau mahasiswa. Jumlah yang relatif rendah, yaitu 8 warga atau 0,90% yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, menunjukkan sedikitnya warga Nagari Gunung Bungbuk Lumpo Kecamatan IV Jurai yang bekerja pada sektor pemerintahan. Pekerjaan di sektor pertanian juga termasuk banyak dengan 133 warga atau 15,03% sebagai petani atau pekebun, mencerminkan pentingnya sektor pertanian dalam ekonomi lokal.

³⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmadi, selaku Kasubag Perencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jumat 22 Desember 2023, Pukul 10.00 WIB.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah mengeluarkan Keputusan Bupati No. 460/326/Kpts/BPT-PS/2022 pada 16 Juni 2022, yang menetapkan tiga kategori miskin, yaitu Sangat Miskin, Miskin, dan Rentan Miskin.

1. Sangat Miskin

Sangat miskin merujuk pada tingkat kemiskinan yang sangat parah dan ekstrem. Individu atau keluarga yang dikategorikan sebagai sangat miskin biasanya mengalami kondisi kehidupan yang penuh dengan keterbatasan dan kesulitan ekstrem. Faktor utama yang menandai kondisi ini termasuk pendapatan yang sangat rendah atau bahkan tidak ada, akses yang sangat terbatas terhadap sumber daya dasar seperti pangan, air bersih, perumahan layak, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.³¹

Orang-orang yang sangat miskin sering kali menghadapi tantangan ekonomi yang sangat berat, dengan tingkat ketidakstabilan yang tinggi. Mereka mungkin tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau akses ke sumber daya produktif, dan sering kali hidup di lingkungan yang tidak aman atau tidak sehat.

Upaya untuk mengatasi kondisi sangat miskin melibatkan program-program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan upaya-upaya lainnya yang bertujuan untuk memberikan dukungan langsung dan berkelanjutan kepada individu atau keluarga tersebut. Pendekatan ini mencakup kebijakan dan program-program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan akses yang lebih baik terhadap peluang ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Langkah-

³¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmadi, selaku Kasubag Perencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jumat 22 Desember 2023, Pukul 10.00 WIB.

langkah ini diarahkan untuk membantu keluar dari lingkaran kemiskinan, menciptakan keberlanjutan, dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

2. Miskin

Miskin adalah suatu kondisi sosial dan ekonomi di mana individu, keluarga, atau kelompok tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk menjalani kehidupan yang layak. Kondisi kemiskinan dapat mencakup keterbatasan akses terhadap pangan, air bersih, perumahan layak, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pekerjaan yang aman dan produktif. Tingkat kemiskinan dapat diukur berdasarkan pendapatan, dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di bawah batas kemiskinan dianggap sebagai miskin.

Kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tetapi tidak terbatas pada kurangnya kesempatan ekonomi, ketidaksetaraan, atau faktor-faktor struktural seperti kebijakan yang tidak mendukung. Kemiskinan juga dapat bersifat relatif, tergantung pada konteks ekonomi dan sosial di suatu wilayah.

Penanggulangan kemiskinan melibatkan serangkaian tindakan dan kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan kondisi hidup mereka yang berada dalam kemiskinan. Upaya ini dapat mencakup bantuan sosial, pelatihan keterampilan, program pemberdayaan ekonomi, dan langkah-langkah lain yang bertujuan untuk menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih baik, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta mengurangi ketidaksetaraan.

3. Rentan Miskin

Rentan miskin merujuk pada kelompok atau individu yang memiliki risiko tinggi untuk terjerumus ke dalam kemiskinan atau menghadapi kesulitan ekonomi. Mereka mungkin tidak sepenuhnya miskin, tetapi berada pada posisi yang rentan dan dapat dengan mudah terkena dampak buruk yang dapat menyebabkan penurunan kondisi ekonomi mereka.

Faktor-faktor yang membuat seseorang atau kelompok rentan miskin bisa bervariasi, termasuk pekerjaan yang tidak tetap, keterbatasan keterampilan atau pendidikan, ketidakstabilan lingkungan ekonomi, serta ketergantungan pada sektor ekonomi yang rentan. Selain itu, perubahan dalam kondisi kesehatan, peristiwa bencana alam, atau perubahan kebijakan pemerintah juga dapat membuat individu atau kelompok menjadi rentan terhadap kemiskinan.

Penanganan rentan miskin melibatkan upaya untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial mereka. Ini bisa mencakup program pelatihan keterampilan, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta kebijakan yang mendukung keberlanjutan ekonomi dan perlindungan sosial. Dengan memahami faktor-faktor yang membuat seseorang atau kelompok menjadi rentan miskin, pihak berwenang dapat merancang program dan kebijakan yang lebih efektif untuk mencegah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan telah memprakarsai serangkaian tahapan strategis dalam upaya menanggulangi kemiskinan di

tengah masyarakat. Dengan mengakui kompleksitas tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh sebagian masyarakat, langkah-langkah ini dirancang untuk memberikan solusi yang terukur dan berkelanjutan. Melalui pendekatan yang komprehensif, Dinas Sosial menetapkan beberapa tahapan yang tidak hanya bertujuan untuk memberikan bantuan langsung, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat agar dapat mandiri secara ekonomi. Peningkatan pada pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pembangunan ekonomi lokal menjadi fokus utama untuk mencapai perubahan positif dalam kesejahteraan masyarakat. Sebagai langkah awal, Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan meyakini bahwa pendekatan kolaboratif ini dapat menciptakan dampak positif yang signifikan dalam mengatasi kemiskinan dan membawa perubahan yang berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat setempat.

Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan telah menjadi kekuatan pendorong perubahan yang berarti dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui serangkaian kebijakan pemerintah yang tersistematis. Melihat kompleksitas permasalahan kemiskinan di tengah masyarakat, dinas ini merumuskan suatu pendekatan yang berfokus pada keberlanjutan dan pemberdayaan. Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), layanan BPJS Kesehatan gratis, dan bantuan sosial menjadi landasan kebijakan utama yang mencerminkan komitmen pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam membawa dampak positif bagi masyarakat miskin. Dengan memahami bahwa penanggulangan kemiskinan bukanlah upaya sepihak, Dinas Sosial berupaya menjembatani kebutuhan mendesak dengan

pendekatan jangka panjang, menciptakan terobosan kebijakan yang mendalam dan merangkul partisipasi aktif masyarakat untuk mencapai tujuan kesejahteraan bersama.³²

Tahapan-tahapan yang dilakukan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu strategi utama dalam penanggulangan kemiskinan. Program ini tidak hanya memberikan bantuan finansial langsung kepada keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan, tetapi juga memberikan insentif bagi mereka yang mematuhi kewajiban pendidikan dan kesehatan. Dengan memberikan dukungan finansial dan pemberdayaan, PKH bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh.

Program ini dirancang sebagai bentuk dukungan kepada keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi rendah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan akses lebih baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. PKH memiliki beberapa tujuan utama, salah satunya adalah mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

PKH memberikan bantuan berupa uang tunai kepada keluarga penerima manfaat dengan syarat bahwa mereka harus memenuhi berbagai kriteria tertentu, seperti memiliki anggota keluarga yang hamil,

³² Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmadi, selaku Kasubag Perencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jumat 22 Desember 2023, Pukul 10.00 WIB.

balita, atau anak usia sekolah. Bantuan ini diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Selain uang tunai, PKH juga memberikan insentif tambahan kepada keluarga yang aktif mengikuti program imunisasi, memeriksakan kesehatan ibu hamil, dan memastikan anak-anaknya bersekolah.

Salah satu pendekatan kunci dalam PKH adalah pemberdayaan keluarga penerima manfaat. Program ini tidak hanya memberikan bantuan finansial secara langsung, tetapi juga melibatkan keluarga dalam kegiatan produktif seperti pengembangan keterampilan, pelatihan usaha kecil, dan pendidikan kesehatan. Hal ini bertujuan untuk memberikan dampak jangka panjang dengan meningkatkan kapasitas keluarga dalam mengatasi kemiskinan secara mandiri.

2. Bantuan Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan program bantuan sosial yang melibatkan pemberian bantuan berupa paket sembako, pakaian layak pakai, dan perlengkapan sekolah kepada keluarga yang membutuhkan. Bantuan sosial ini tidak hanya bersifat mendesak untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga dapat memberikan bantuan psikososial dan meringankan beban ekonomi keluarga yang rentan terhadap kemiskinan.³³

Bentuk bantuan sosial dapat sangat bervariasi, mencakup pemberian uang tunai, sembako, pelayanan kesehatan gratis, bantuan pendidikan, hingga program-program pelatihan keterampilan. Pemilihan

³³ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmadi, selaku Kasubag Perencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jumat 22 Desember 2023, Pukul 10.00 WIB.

jenis bantuan bergantung pada kebutuhan dan kondisi spesifik masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut. Pemberian bantuan sosial biasanya didasarkan pada kriteria tertentu, seperti tingkat pendapatan, status kesehatan, usia, atau keadaan darurat tertentu. Dalam banyak kasus, pemerintah melibatkan badan statistik atau lembaga verifikasi data untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan secara tepat dan efisien.

Selain memberikan bantuan materil, program bantuan sosial seringkali melibatkan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Ini melibatkan kegiatan seperti pelatihan keterampilan, pendampingan, atau program pengembangan usaha kecil untuk membantu penerima manfaat menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Keseluruhan, bantuan sosial bukan hanya merupakan respons terhadap kebutuhan mendesak masyarakat, tetapi juga merupakan upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial dan memberikan dukungan bagi mereka yang berjuang dalam menghadapi tantangan hidup. Dalam beberapa kasus, program bantuan sosial dapat menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta memberikan peluang yang lebih adil dalam masyarakat. Melalui bantuan sosial, diharapkan masyarakat yang rentan dapat merasakan perbaikan signifikan dalam kualitas hidup mereka.

3. BPJS Gratis

Dalam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan program pemberian akses gratis atau subsidi biaya BPJS Kesehatan. Langkah ini tidak hanya memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat berpendapatan rendah tetapi juga mengurangi risiko kemiskinan yang disebabkan oleh biaya pengobatan yang tinggi.³⁴

Peserta BPJS gratis biasanya terdiri dari kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah, seperti penerima bantuan sosial, keluarga pra-sejahtera, dan masyarakat berpendapatan rendah lainnya. Program ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan dan memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa harus membayar premi atau biaya tambahan.

Peserta BPJS gratis dapat menikmati berbagai layanan kesehatan, termasuk pemeriksaan medis, perawatan rawat inap, obat-obatan, serta layanan kesehatan prasejahtera seperti imunisasi dan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Program ini membantu meringankan beban finansial masyarakat yang mungkin kesulitan untuk membayar biaya kesehatan sendiri. Selain itu, program BPJS gratis juga berfokus pada upaya pencegahan penyakit dan promosi kesehatan. Ini mencakup penyuluhan kesehatan, imunisasi, dan program-program lainnya yang

³⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmadi, selaku Kasubag Perencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jumat 22 Desember 2023, Pukul 10.00 WIB.

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan secara preventif.

Untuk menjadi peserta BPJS gratis, penerima program harus mendaftar dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini seringkali melibatkan verifikasi data ekonomi dan sosial guna memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya.

Program BPJS gratis menjadi langkah yang tepat dalam mewujudkan hak kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan memberikan akses kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Program ini tidak hanya merupakan upaya konkret untuk mengatasi ketidaksetaraan, tetapi juga langkah strategis dalam menciptakan fondasi masyarakat yang lebih sehat dan produktif.

4. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan memberikan bantuan langsung tunai kepada keluarga atau individu yang berada dalam kondisi kemiskinan. Bantuan ini memberikan fleksibilitas kepada penerima untuk menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan mendesak, seperti pemenuhan kebutuhan pangan, pendidikan, atau kesehatan. Bantuan langsung tunai dapat menjadi instrumen efektif dalam memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan individu dan keluarga. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan langsung kepada masyarakat yang

membutuhkan, dengan memberikan kelonggaran finansial untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bantuan ini disalurkan dalam bentuk uang tunai agar penerima manfaat dapat menggunakan dana tersebut sesuai dengan prioritas kebutuhan mereka.³⁵

Pengidentifikasian penerima BLT biasanya didasarkan pada kriteria tertentu, seperti tingkat pendapatan, kondisi ekonomi, atau kejadian khusus yang dapat mempengaruhi kemampuan ekonomi keluarga. Data yang akurat dan terverifikasi menjadi kunci dalam menentukan siapa yang memenuhi syarat untuk menerima BLT. Pemerintah dapat melibatkan lembaga statistik atau pihak berwenang lainnya untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam proses penyaluran bantuan.

BLT membawa dampak langsung terhadap kondisi keuangan keluarga penerima manfaat. Dana yang diterima dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seperti makanan, pendidikan, kesehatan, atau pembayaran tagihan penting lainnya. Bantuan ini memberikan fleksibilitas kepada keluarga untuk mengalokasikan dana sesuai dengan prioritas mereka sendiri.

Selain memberikan bantuan materiil, BLT juga dapat berfungsi sebagai stimulus ekonomi lokal. Dengan memberikan uang tunai kepada masyarakat yang membutuhkan, program ini secara tidak langsung meningkatkan daya beli di tingkat lokal, mendukung keberlanjutan usaha mikro, dan merangsang pertumbuhan ekonomi di tingkat komunitas.

³⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmadi, selaku Kasubag Perencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jumat 22 Desember 2023, Pukul 10.00 WIB.

Pentingnya BLT tidak hanya terletak pada upaya penanggulangan kemiskinan secara langsung, tetapi juga dalam menciptakan efek domino yang positif dalam ekosistem sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, program BLT perlu dirancang dan diimplementasikan dengan cermat, dengan mempertimbangkan kebutuhan unik masyarakat yang menjadi sasaran, serta berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan dampak jangka panjang. Melalui BLT, pemerintah berupaya memberikan dukungan konkret kepada masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Melalui tahapan-tahapan ini, Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan berupaya memberikan pendekatan holistik dalam menanggulangi kemiskinan. Kombinasi dari bantuan finansial, pemberdayaan, dan akses terhadap layanan kesehatan diharapkan dapat menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

B. Kendala-Kendala Yang Di Hadapi Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Nagari Gunung Bungkok Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan wawancara dengan pihak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, Bapak Rahmadi Kasubag Perencana bahwa kendala-kendala yang ditemui yaitu:

1. Data Penduduk Yang Tidak Valid

Data penduduk yang tidak valid mencakup ketidakakuratan data, seperti kesalahan dalam mencatat usia, jenis kelamin, atau status perkawinan, dapat menimbulkan masalah dalam program dan perencanaan pembangunan. Hal ini bisa terjadi karena beberapa alasan, seperti kurangnya informasi yang benar, aturan yang tidak jelas, atau kesalahan dalam menentukan siapa yang benar-benar membutuhkan bantuan. Akibatnya, bantuan yang seharusnya diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan bisa saja tidak sampai ke tujuannya. Ini bisa membuat kelompok-kelompok yang sebenarnya membutuhkan bantuan besar malah tidak terbantu, sementara orang-orang yang sebenarnya tidak memerlukan bantuan bisa saja mendapatkannya. Kesalahan ini juga bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap program bantuan kemiskinan, yang bisa mengurangi dukungan dan keberlanjutan program kesejahteraan masyarakat tersebut.³⁶

³⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmadi, selaku Kasubag Perencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jumat 22 Desember 2023, Pukul 10.00 WIB.

2. Verifikasi Lapangan

Verifikasi lapangan merupakan langkah penting untuk memastikan keabsahan dan akurasi data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Proses ini melibatkan kunjungan langsung ke lokasi atau rumah penerima program kesejahteraan masyarakat tersebut untuk memverifikasi informasi yang tepat. masalah ini terjadi akibat dari beberapa faktor seperti area terpencil atau jauh dari permukiman warga, kurangnya pelatihan bagi petugas lapangan, kurangnya kerja sama antara petugas dan masyarakat setempat untuk memastikan kebenaran informasi dan kesalahan data. Verifikasi lapangan harus dilakukan agar dapat membuat data yang benar dan penerima program kesejahteraan masyarakat bisa mendapatkan haknya.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Keterbatasan Sumber Daya Manusia menjadi masalah yang sangat sulit untuk melakukan program kesejahteraan masyarakat. Hal ini terjadi akibat keterbatasan jumlah dan kualitas anggota yang terlibat dalam pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat. Sumber daya manusia harusnya mencakup tim atau pekerja yang bertanggung jawab serta mempunyai skill yang bagus untuk mengelola dan melaksanakan program kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, masalah dapat terjadi akibat dari beberapa faktor.

Pertama, jumlah anggota mungkin tidak mencukupi untuk melaksanakan program kesejahteraan masyarakat ke seluruh wilayah yang dituju. Ini dapat menyebabkan beban kerja yang berat bagi anggota

yang minim pada daerah tersebut, akibatnya terjadi potensi penurunan kualitas layanan.

Kedua, keterbatasan dalam keterampilan dan pelatihan anggota dapat menjadi hambatan. Jika tim tidak memiliki keahlian yang memadai atau pemahaman mendalam tentang aspek tertentu dari program, ini dapat mempengaruhi pelaksanaan program kesejahteraan tersebut.

4. Kendala Teknologi dalam Program Kesejahteraan Masyarakat

Kendala teknologi dalam program kesejahteraan masyarakat adalah masalah yang timbul karena keterbatasan dalam penggunaan alat-alat teknologi dan jaringan internet, dengan demikian masyarakat yang tidak memiliki fasilitas tersebut tidak dapat mengakses program-program yang dijalankan oleh pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Masyarakat yang tidak memiliki akses internet mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi terkini mengenai peluang pekerjaan, layanan kesehatan, dan program bantuan pemerintah. Ini bisa berdampak pada kemampuan mereka untuk membuat keputusan informasional yang tepat dan memanfaatkan sumber daya yang mungkin mereka butuhkan.³⁷

5. Ketidakpartisipan Masyarakat

Ketidakpartisipan masyarakat dapat menjadi kendala serius dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Masyarakat yang tidak terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program penanggulangan kemiskinan cenderung menghadapi hambatan signifikan dalam pencapaian tujuan pembangunan. Ketidakpartisipan bisa

³⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmadi, selaku Kasubag Perencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jumat 22 Desember 2023, Pukul 10.00 WIB.

disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk kurangnya pemahaman tentang program, kurangnya transparansi dalam pengelolaan program, atau bahkan ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga yang mengelolanya.

Tanpa partisipasi masyarakat, program penanggulangan kemiskinan mungkin tidak mampu memahami secara holistik kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat yang berada dalam kondisi kemiskinan. Masyarakat memiliki pemahaman mendalam tentang konteks lokal, kebutuhan spesifik, dan potensi solusi yang dapat diimplementasikan. Oleh karena itu, ketidakpartisipan mereka dapat mengakibatkan kebijakan dan program yang tidak sesuai dengan realitas masyarakat setempat.

6. Faktor Geografis

Faktor Geografis menjadi masalah kemiskinan di berbagai wilayah. Wilayah yang terpencil, terutama daerah yang sulit dijangkau karena medan yang sulit, seringkali menghadapi tantangan unik dalam penanggulangan kemiskinan. Aksesibilitas menjadi kendala utama di wilayah-wilayah ini, mengakibatkan kesulitan dalam mendistribusikan bantuan dan layanan sosial yang penting. Infrastruktur transportasi yang terbatas, ditambah dengan kondisi jalan yang buruk, dapat memperlambat mobilitas masyarakat dan membuatnya sulit untuk mengakses pekerjaan atau pendidikan.³⁸

³⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmadi, selaku Kasubag Perencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jumat 22 Desember 2023, Pukul 10.00 WIB.

C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Nagari Gunung Bungbuk Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

Upaya-upaya yang dihadapi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dalam Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Dinas Sosial Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Nagari Gunung Bungbuk Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Pekerja Sosial Masyarakat

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) merupakan profesi yang memiliki peran strategis dalam membantu individu, keluarga, dan masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah sosial yang mereka hadapi. Seorang PSM bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan menciptakan kondisi yang mendukung perkembangan manusia. Tugas utamanya melibatkan pendampingan, advokasi, serta memberikan bantuan sosial dan psikososial kepada individu atau kelompok yang memerlukan. Pekerja Sosial Masyarakat berfokus pada pencegahan, penyelesaian, dan pemberdayaan dalam menghadapi berbagai isu sosial, seperti kemiskinan, pelecehan, kekerasan, masalah kesehatan mental, atau masalah keluarga. Mereka bekerja secara langsung di lapangan, berinteraksi dengan masyarakat, dan mengidentifikasi kebutuhan serta sumber daya yang tersedia.³⁹

³⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmadi, selaku Kasubag Perencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jumat 22 Desember 2023, Pukul 10.00 WIB.

Pekerja Sosial Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat, mengedepankan pendekatan yang berbasis hak asasi manusia dan keadilan sosial. Mereka juga seringkali terlibat dalam mendukung kelompok-kelompok rentan, seperti anak-anak terlantar, kaum difabel, atau warga lanjut usia, untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan kebutuhan mereka terpenuhi.

Dalam tugasnya, seorang PSM bekerja sama dengan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Mereka berperan sebagai mediator antara masyarakat dan sumber daya yang tersedia, membantu menyusun kebijakan, dan memastikan bahwa solusi yang diusulkan memperhitungkan realitas sosial dan budaya setempat. Selain itu, Pekerja Sosial Masyarakat juga memiliki peran dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka, membangun kapasitas individu dan kelompok, serta mengidentifikasi potensi pengembangan komunitas. Dengan pemahaman mendalam tentang dinamika sosial, kebijakan, dan kerangka kerja kesejahteraan sosial, Pekerja Sosial Masyarakat berusaha menciptakan perubahan positif dan berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat yang mereka layani.

2. Pendamping Program Keluarga Harapan

Pendamping Keluarga Harapan (PKH) merupakan figur sentral dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang merupakan salah satu inisiatif pemerintah Indonesia untuk mengurangi tingkat kemiskinan

dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Peran pendamping PKH melibatkan sejumlah tanggung jawab yang melibatkan aspek pendampingan, pemberdayaan, dan pengawasan terhadap keluarga penerima manfaat.⁴⁰

Pertama, pendamping PKH berperan dalam identifikasi dan verifikasi keluarga yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat PKH. Mereka melakukan kunjungan ke rumah calon penerima manfaat untuk memastikan keabsahan data yang diberikan oleh keluarga tersebut. Setelahnya, pendamping PKH secara aktif terlibat dalam membimbing keluarga penerima manfaat dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam sektor pendidikan, pendamping PKH berkomitmen untuk memberikan pendampingan agar anak-anak keluarga penerima manfaat mendapatkan akses pendidikan yang layak. Ini melibatkan monitoring kehadiran anak-anak di sekolah, memberikan dukungan dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan, dan memfasilitasi akses ke berbagai program pendidikan.

Di bidang kesehatan, pendamping PKH juga memainkan peran yang penting. Mereka bertugas memastikan keluarga penerima manfaat memiliki akses ke layanan kesehatan yang memadai. Ini dapat mencakup penyuluhan tentang praktik hidup sehat, pemantauan imunisasi anak-anak, dan pendampingan selama proses pelayanan kesehatan.

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmadi, selaku Kasubag Perencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jumat 22 Desember 2023, Pukul 10.00 WIB.

3. Pendidikan dan Pelatihan

Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial dapat menyelenggarakan kursus-kursus pelatihan seperti pelatihan keterampilan teknis, manajerial, atau pengembangan usaha. Tujuan utamanya adalah memberikan wawasan dan pengetahuan yang dapat meningkatkan potensi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan atau memulai usaha sendiri. Pendekatan ini memberikan landasan yang kokoh untuk pemahaman dan pengembangan diri, sehingga masyarakat miskin dapat memiliki peluang yang lebih baik dalam meningkatkan taraf hidup mereka.

Selain itu, pendidikan dan pelatihan juga berperan dalam mengubah paradigma masyarakat terkait dengan pengetahuan dan keterampilan. Dengan memperkuat basis pengetahuan dan keterampilan, masyarakat miskin dapat lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Program ini juga dapat mencakup pembelajaran kecakapan hidup, manajemen keuangan, atau wawasan kewirausahaan yang dapat memberikan bekal berharga untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.

4. Koordinasi dengan Pihak Terkait

Dinas Sosial berfokus pada koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Hal ini melibatkan kerja sama antara Dinas Sosial, lembaga pemerintah lainnya, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Kolaborasi ini menjadi esensial karena penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu

instansi, melainkan memerlukan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan.

Dalam menjalankan program-programnya, Dinas Sosial berkoordinasi dengan lembaga pemerintah seperti dinas-dinas terkait, misalnya dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan dinas ketenagakerjaan. Kolaborasi dengan pemerintah daerah ini penting untuk memastikan bahwa program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan secara terintegrasi dan saling mendukung dengan program-program lainnya yang dijalankan oleh pemerintah.⁴¹

Tidak hanya itu, kerja sama dengan organisasi non-pemerintah (LSM) juga menjadi bagian integral dari upaya penanggulangan kemiskinan. LSM seringkali memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap kondisi masyarakat dan dapat memberikan dukungan yang khusus sesuai dengan kebutuhan yang diidentifikasi secara langsung di lapangan. Dengan membangun kemitraan dengan LSM, Dinas Sosial dapat memperluas jangkauan program dan mendapatkan perspektif yang lebih holistik.

Kerjasama dengan sektor swasta juga mencakup kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan dalam rangka mendukung pelatihan keterampilan dan penciptaan peluang pekerjaan. Sebagai contoh, perusahaan dapat berperan dalam memberikan pelatihan vokasional atau membuka kesempatan kerja bagi masyarakat yang telah mengikuti program-program penanggulangan kemiskinan.

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmadi, selaku Kasubag Perencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jumat 22 Desember 2023, Pukul 10.00 WIB.

Koordinasi lintas sektor ini memungkinkan pertukaran informasi, sumber daya, dan pengalaman antarlembaga. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi implementasi program-program penanggulangan kemiskinan, tetapi juga menciptakan dampak yang lebih besar dalam mengatasi akar penyebab kemiskinan secara komprehensif.

Dengan menjembatani kerja sama antarpihak terkait, Dinas Sosial menciptakan fondasi yang kokoh untuk menjalankan program penanggulangan kemiskinan dengan efektivitas dan kesinambungan. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam merespons kompleksitas tantangan kemiskinan dan mencapai hasil yang berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan merinci pendekatan pendidikan dan pelatihan dalam penanggulangan kemiskinan, Dinas Sosial mendorong perubahan positif dalam taraf hidup masyarakat. Melalui peningkatan keterampilan dan pengetahuan, diharapkan masyarakat miskin dapat membuka pintu menuju peluang ekonomi yang lebih baik dan mengarah pada peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan.

5. Pendamping dan Konseling

Dinas Sosial aktif terlibat dalam memberikan layanan pendampingan dan konseling kepada keluarga atau individu yang berada dalam kondisi kemiskinan. Pendampingan ini mencakup serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memberikan dukungan psikososial dan praktis kepada mereka yang menghadapi kesulitan ekonomi. Dalam kerangka ini, pekerja sosial dan konselor di Dinas Sosial memiliki peran

krusial dalam membantu individu atau keluarga mengatasi tantangan hidup yang kompleks.⁴²

Pendekatan pendampingan dan konseling dalam konteks kemiskinan tidak hanya melibatkan pemenuhan kebutuhan materiil, melainkan juga memahami dan merespon dampak psikologis serta sosial dari kondisi tersebut. Pelembagaan kemiskinan seringkali memunculkan tekanan mental, rasa rendah diri, dan perasaan putus asa. Oleh karena itu, pelayanan ini membuka ruang untuk mendengarkan keluhan, memahami perasaan, dan memberikan dukungan emosional.

Pekerja sosial dan konselor di Dinas Sosial dilatih untuk membangun hubungan yang empatik dan mendalam dengan klien mereka. Mereka memberikan pandangan objektif tentang situasi yang dihadapi, membantu klien merumuskan solusi untuk masalah mereka, dan memberikan dukungan positif selama proses perubahan. Pendampingan ini juga melibatkan penyusunan rencana aksi untuk membantu klien mencapai tujuan mereka, baik itu dalam hal peningkatan kesejahteraan ekonomi, peningkatan keterampilan, atau mengatasi masalah pribadi.

Konseling dalam konteks kemiskinan juga memberikan ruang bagi individu atau keluarga untuk berekspresi tentang pengalaman hidup mereka, mencari pemahaman tentang berbagai tantangan, dan mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah. Proses konseling ini dapat mencakup diskusi tentang perencanaan keuangan, manajemen, atau

⁴² Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmadi, selaku Kasubag Perencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jumat 22 Desember 2023, Pukul 10.00 WIB.

pengembangan keterampilan hidup yang dapat membantu mereka melangkah keluar dari situasi kemiskinan. Selain itu, Dinas Sosial dapat mengarahkan klien menuju sumber daya dan layanan tambahan yang dapat memberikan dukungan lebih lanjut, seperti layanan kesehatan mental atau pelatihan keterampilan khusus. Kolaborasi dengan berbagai sektor ini membantu memastikan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan bersifat menyeluruh.

Melalui pendampingan dan konseling ini, Dinas Sosial bukan hanya memberikan solusi, tetapi juga berupaya untuk memberdayakan individu atau keluarga yang mengalami kemiskinan, memberikan mereka kepercayaan diri dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola kehidupan mereka secara mandiri. Pendekatan ini tidak hanya mendukung proses perubahan, tetapi juga menciptakan hubungan saling percaya antara pihak Dinas Sosial dan masyarakat yang memerlukan bantuan.

6. Monitoring dan Evaluasi

Dinas Sosial melakukan upaya monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap program-program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan. Ini adalah langkah krusial dalam memastikan bahwa program-program tersebut berjalan dengan efektif, memberikan dampak yang diinginkan, dan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi atau kebutuhan masyarakat. Monitoring melibatkan pemantauan terus-menerus terhadap pelaksanaan program sehari-hari. Dinas Sosial mengumpulkan data secara rutin untuk mengukur kemajuan,

mengidentifikasi potensi masalah dan memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien. Hal ini memungkinkan dinas untuk merespon perubahan kondisi lapangan dengan cepat dan melakukan koreksi jalur jika diperlukan.⁴³

Evaluasi melibatkan penilaian mendalam terhadap dampak jangka panjang program. Dinas Sosial menganalisis data dan informasi yang terkumpul untuk mengukur sejauh mana program telah mencapai tujuannya, baik itu dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Evaluasi ini juga membantu menentukan keberlanjutan program atau kebutuhan untuk melakukan perubahan strategi.

Pentingnya monitoring dan evaluasi tidak hanya terletak pada pemantauan kinerja program, tetapi juga pada akuntabilitas terhadap masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat. Dengan transparansi dan komunikasi yang baik, Dinas Sosial dapat melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi, dan memastikan bahwa program-program yang dijalankan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, hasil dari monitoring dan evaluasi juga dapat digunakan sebagai alat pembelajaran. Dinas Sosial dapat mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan dari berbagai inisiatif, dan membagikan pembelajaran tersebut ke berbagai pihak terkait. Hal ini memungkinkan dinas untuk terus meningkatkan efektivitas program dan menerapkan praktik terbaik dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

⁴³ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmadi, selaku Kasubag Perencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jumat 22 Desember 2023, Pukul 10.00 WIB.

Dengan memprioritaskan monitoring dan evaluasi, Dinas Sosial tidak hanya menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas dan efektivitas, tetapi juga menciptakan dasar yang kuat untuk perbaikan berkelanjutan. Ini memastikan bahwa sumber daya yang terbatas digunakan dengan optimal untuk memberikan dampak yang signifikan dalam mengatasi tantangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Nagari Gunung Bungkok Lumpo Kecamatan IV J urai Kabupaten Pesisir Selatan dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Tahapan-Tahapan Yang Dilakukan Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Nagari Gunung Bungkok Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan , yakni:
 - a. Dinas Sosial Memberikan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada keluarga yang miskin. Tujuan PKH adalah memberikan bantuan kepada keluarga miskin dan rentan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan.
 - b. Dinas Sosial memberikan Bantuan Sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Tujuan Bantuan Sosial adalah untuk membantu mereka mengatasi keterbatasan ekonomi, memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
 - c. Dinas Sosial menyediakan layanan untuk BPJS Gratis bagi masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan, Program ini bertujuan agar mereka tetap memiliki akses terhadap layanan kesehatan tanpa harus membayar iuran penuh.

- d. Dinas Sosial memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin, Tujuan BLT adalah untuk membantu mereka mengatasi kondisi ekonomi sulit, memenuhi kebutuhan dasar, dan meningkatkan kesejahteraan.
2. Kendala-Kendala Yang Di Hadapi Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Nagari Gunung Bungkok Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan memiliki beberapa kendala, yakni:
 - a. Data Penduduk Yang Tidak Valid
 - b. Verifikasi Lapangan
 - c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
 - d. Kendala Teknologi dalam Program Kesejahteraan Masyarakat
 - e. Ketidakpartisipan Masyarakat
 - f. Faktor Geografis
 3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Nagari Gunung Bungkok Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, adalah sebagai berikut:
 - a. Dinas Sosial menyediakan Pekerja Sosial Masyarakat.
 - b. Dinas Sosial menyediakan Pendamping Program Keluarga Harapan.
 - c. Dinas Sosial melaksanakan Program Pendidikan dan Pelatihan.
 - d. Dinas Sosial melakukan Koordinasi dengan Pihak Terkait.
 - e. Dinas Sosial menyediakan Pendamping dan Konseling.
 - f. Dinas Sosial melakukan Monitoring dan Evaluasi.

B. Saran

Agar Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Nagari Gunung Bungkok Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dapat terlaksanakan dengan baik, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Agar Dinas Sosial memperkuat mekanisme Validitas Data untuk membantu mengurangi kesalahan dan ketidakakuratan data.
2. Agar Dinas Sosial mengoptimalkan Verifikasi Lapangan untuk memperoleh informasi yang lebih tepat dan akurat.
3. Agar Dinas Sosial meningkatkan Sumber Daya Manusia untuk dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan efisiensi operasional.
4. Agar Dinas Sosial menggunakan Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk dapat mempermudah pengelolaan data dan mengurangi hambatan akses teknologi di tingkat masyarakat.
5. Agar Dinas Sosial melibatkan Partisipasi Masyarakat untuk dapat meningkatkan efektivitas program.
6. Agar Dinas Sosial memperkuat Koordinasi Antar sektor untuk meningkatkan sinergi antar instansi.
7. Agar Dinas Sosial menyediakan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat.
8. Agar Dinas Sosial melakukan Monitoring dan evaluasi untuk memastikan setiap program dapat berjalan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abu Ahmadi, 2009, *Ilmu Sosial Dasar*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Dwiloka dan Rati Riana, 2012, *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Burhan Ashshofda, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Edi Suharto, 2005, *Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan dan Pekerja Sosial*, Refika Aditama, Bandung.
- Isbandi Rukminto Adi, 2001, *Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Sosial dan Intervensi Komunitas*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Jimly Asshiddi, 2015, *Konstitusi Bernegara*, Setara Press, Malang.
- Mawardani dan Nur Hidayati, 2000 *Iad, Isd, Ibd*, Pustaka Setia, Bandung.
- Mohammad Agung, 2001, *Kemiskinan di Perkotaan*, Penerbit Unissula Press, Semarang.
- Peter Mahfud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta.
- Soegijoko, Budi Tjahjati S, dan BISA Kusbiantoto ed, 1997, *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Soegijanto Soegijoko, Bandung.
- Soerjono S, 2000, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CET III, ed, II, Balai Pustaka, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zubaedi, 2007, *Wacana Pembangunan Alternatif*, Ar-Ruzz media, Yogyakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan
Deskontrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan Kepala Dinsos Daerah
Provinsi dan Dinsos daerah kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018

Peraturan Bupati Nomor 167 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

C. SUMBER LAIN

Adam Ubaidilla, *Upaya Mengatasi dan Pengentasan Masalah kemiskinan*,
<https://www.kompasiana.com/adam18881/616469c10101907d690b8993/upaya-mengatasi-dan-pengentasan-masalah-kemiskinan>

Admin. *Apa Yang Menjadi Tugas Dinas Sosial Dalam Masyarakat?*,
<https://www.omahbse.com/blog/apa-yang-menjadi-tugas-dari-dinas-sosial-dalam-masyarakat/>

AMANDA AYU RIZQIANINGRUM, Kesehatan dan Kesejahteraan adalah
Kunci Menuju Kehidupan yang Berkualitas,
<https://retizen.republika.co.id/posts/237440/kesehatan-dan-kesejahteraan-adalah-kunci-menuju-kehidupan-yang-berkualitas>

Andreas Wiratmo Situmeang, Rendahnya Mutu Pelayanan Kesehatan
Penduduk di Indonesia, <https://www.kompasiana.com/andre458/58502f050323bd8d24ddd2a/rendahnya-mutupelayanankesehatanpenduduk-di-indonesia>

Dwi Astuti 2021 *Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Kesejahteraan dan
kemandirian Masyarakat*, <http://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs2.4.83/index.php/ensiklopedia/article/view/746>

- Dyah Ayu Arry Puspa, *Ketidakmerataan Pendidikan di Indonesia*,
<https://www.kompasiana.com/dyah73392/610430389f7b9d48cf3986d2/ketidakmerataan-pendidikan-di-indonesia>.
- EkiNurhudaAlmutaqin, *Ketidaksetaraan Ekonomi*, <https://kuninganmass.com/ketidaksetaraan-ekonomi/>
- Marlison, *Pemkab Pesisir Selatan kembangkan potensi pariwisata untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat*. <https://berita.pesisirselatankab.go.id/berita/detail/pemkab-pesisir-selatan-kembangkan-potensi-pariwisata--untuk-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat>
- Redaksi, *BPS catat angka kemiskinan di Pessel tertinggi dalam 5 tahun terakhir*,
<https://klikpositif.com/bps-catat-angka-kemiskinan-di-pessel-tertinggi-dalam-5-tahun-terakhir-ini-penyebabnya/>
- Serafica Gischa, *Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*,
https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/20/164114169/upaya-mewujudkan-kesejahteraan-masyarakat#google_vignette